

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah era reformasi pada tahun 1998, keluarlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi lagi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai kerangka acuan pelaksanaan otonomi daerah (Mulatsih, 2015). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 tahun 2004). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mulatsih, 2015).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitas daerah tersebut (Waskito, 2010). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta

partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah, dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik, maka berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Kaunang, 2016).

Kebijakan otonomi daerah, dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas kebawah tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu (Mulatsih, 2015). Dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian keuangan daerah sendiri (Mulatsih, 2015).

Sejalan dengan upaya untuk menetapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Dari hal tersebut kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan apabila disertai kemandirian keuangan daerah yang efektif. Hal ini berarti

bahwa pemerintah daerah harus sebanyak mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (Rudianto, 1997). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mulatsih, 2015).

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintah dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mulatsih, 2015).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan investasi (Mahmudi, 2002). Investasi daerah merupakan

pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Mahmudi, 2002).

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang diberi wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan penyerahan wewenang tersebut tentunya pemerintah berharap agar Provinsi Jawa Timur dapat menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan otonomi daerah ini sangat diperlukan kerjasama dari setiap daerah agar Provinsi Jawa Timur berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah, hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Timur mempunyai Kabupaten dan Kota yang cukup banyak yaitu sebanyak 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten.

Hal yang paling utama yang mencirikan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada Pemerintah Pusat diusahakan seminimal mungkin. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang memiliki perekonomian yang baik. Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur selama tahun 2012-2014 cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 6,3 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,9 persen. Hal tersebut disebabkan karena Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis di bidang industri karena terletak di antara Jawa Tengah dan Bali sehingga

menjadi pusat pertumbuhan industri dan perdagangan (www.jatimprov.go.id diakses pada Maret 2017). Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan daerahnya sendiri agar tercapai kemandirian sebagai tujuan dari adanya otonomi daerah.

Hasil Penelitian Mulatsih (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sama dengan penelitian Renny (2013) yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Rostina (2014) dengan judul Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Kota Sumatera menunjukkan bahwa investasi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Alfarisi (2015), menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah penelitian Julitawati (2012) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi jangka panjang dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2015. Penelitian ini mengacu pada penelitian Wulan (2016) dengan beberapa perbedaan. Penelitian Wulan (2016) menggunakan variabel komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah dengan memasukan seluruh

komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi jangka panjang dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah, serta untuk mengetahui perkembangan dari kemandirian keuangan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2015 . Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah pada setiap periode, untuk tujuan perbaikan kinerja dimasa mendatang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi Jangka Panjang dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2015)**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ?
2. Bagaimana pengaruh investasi jangka panjang terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ?

3. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi jangka panjang, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi jangka panjang terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi jangka panjang, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kemandirian keuangan daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur.

3. Bagi Peneliti

Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Diharapkan penelitian ini bisa menyempurnakan penelitian bikutnya dan bisa menjadi acuan supaya penelitian selanjutnya lebih baik.